

# ✓ 'Methodenstreit' Antara Hisab dan Rukyah

(Tanggapan terhadap Tulisan Susiknan Azhari)

TULISAN Susiknan Azhari berjudul 'Idul Fitri Antara Hisab dan Rukyah' di Harian Kedaulatan Rakyat (22/6) memaparkan beberapa poin yang patut dikritisi lebih lanjut. *Pertama*, kontekstualisasi pesan Alquran dan As-sunnah dalam ihwal penentuan waktu pelaksanaan ibadah (baik puasa, idul fitri dan lainnya) melalui rukyah tidak sekadar sebagai sumber data. Melainkan juga sebagai metode yang bisa jadi bermetamorfosis pada bentuk lain.

*Kedua*, perlunya kontekstualisasi rukyah sebagai sumber data menjadi metode agar memberikan peluang yang lebih luas bagi umat Islam untuk memiliki kalender Islam yang mapan yang digunakan sebagai acuan berbagai tindakan muamalah. *Ketiga*, atas alasan harmonisasi hubungan antarumat Islam dalam menghadapi idul fitri yang berpotensi berbeda karena ketinggian hilal pada tanggal 4 Juli 2016 akan berada di bawah ufuk antara satu derajat sampai minus dua derajat, disarankan oleh Susiknan Azhari bahwa sidang isbat awal syawal 1437 H bisa dilakukan awal. Ini artinya metode hisab menjadi lazim digunakan sebagai metode penentuannya.

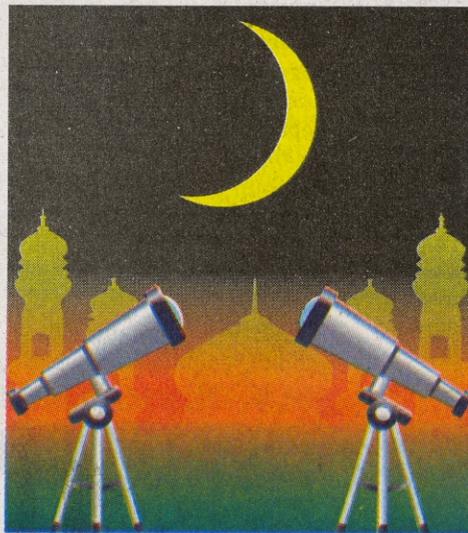
## Perdebatan Metode

Hemat penulis, tiga poin yang penulis pahami dari tulisan Susiknan Azhari yang seolah-olah menggambarkan pembenaran sepihak. Bahwa atas dasar kontekstualisasi dan harmonisasi maka hisab sebagai metode patut digunakan sebagai pintu masuk penyusunan kalender Islam. Juga penentuan awal bulan maupun waktu pelaksanaan ibadah, baik puasa, idul fitri, dan ritual ibadah lainnya.

Padahal, potret perdebatan metode (*methodenstreit*) untuk mengetahui hilal terjadi di berbagai negara tak terkecuali di beberapa negara Islam seperti Libanon dan Makkah. Sebagaimana diuraikan Susiknan Azhari bahwa konferensi Libanon 2010 merekomendasikan penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan sedangkan Makkah menekankan metode rukyah (observasi). Lalu apakah untuk meres-

## Fathorrahman Ghufron

pons *methodenstreit* tersebut dan denti lestari-nya kerukunan sosial umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadahnya yang didasarkan pada awal bulan dan waktu pelaksanaannya yang disesuaikan dengan selera kelompok tertentu? Semisal kelompok yang menggunakan hisab, lalu yang patut digunakan sebagai metode adalah hisab?



KR-JOKO SANTOSO

Di sinilah problem krusial akan terjadi. Persoalan tidak sekadar bagaimana melakukan kontekstualisasi rukyah sebagai sumber data menjadi metode. Atau mengasumsikan bahwa kerukunan sosial Umat Islam bisa diselesaikan dengan mengalihkan cara pandang lain berupa hisab dalam hal penentuan awal bulan.

## Pemahaman Intersubjektif

Ihwal perselisihan metode dalam mengembangkan keilmuan tidak hanya terjadi pada persoalan penentuan awal bulan maupun waktu ibadah seperti yang direpresentasikan pada rukyah dan hisab. Apalagi di luar keduanya banyak metode lain yang dikembangkan

berbagai kelompok keagamaan tentang bagaimana membaca tanda-tanda alam sebagai penanda masuknya waktu yang diyakini sebagai keabsahan ibadah oleh mereka.

Apalagi, muncul pembenaran sepihak dari kelompok penganut ilmu-ilmu alam yang menyublimasi ilmu pengetahuan alam sebagai motor penggerak sebuah ilmu pengetahuan. Di tengah runcing perselisihan tersebut, maka Max Weber menyerukan kesalingpahaman antara dua kelompok bahwa sebaiknya dua corak keilmuan ini ditaruh dalam 'satu atap'.

Pelajaran penting dari *methodenstreit* yang terjadi pada abad ke-20 tersebut, bila ditarik dalam konteks penentuan awal bulan qamariah yang dilakukan oleh dua kelompok besar di Indonesia. Di mana satu kelompok menggunakan rukyah dan kelompok lain menggunakan hisab, tentu bila tidak diatasi dengan langkah maju seperti yang dilakukan oleh Max Weber dengan model 'satu atap' nya maka, sampai kapan pun perselisihan itu akan terjadi. Pemerintah harus menjadi pelopor sekaligus yang bisa dipercaya untuk menciptakan sebuah atap yang bisa menaungi berbagai pihak.

Diperlukan pemahaman intersubjektif antara masing-masing kelompok untuk tidak semata-mata mengedepankan landasan keilmuannya sebagai tolak ukur pembenaran bagi kemungkinan lahirnya kalender Islam. Apalagi menganggap metode kelompoknya sendiri sebagai pijakan penentuan yang lebih memungkinkan untuk membangun iklim kehidupan keislaman yang lebih mumpuni. Sebaiknya, masing-masing pihak duduk bersama untuk mendiskusikan pijakan metodologis dalam menentukan idul fitri dengan mengacu pada prinsip kesalingpahaman. Semua pihak harus saling menghargai latar belakang keilmuan yang digunakan. Karena pada keduanya sama-sama memiliki kelebihan. □ - o

\*) **Fathorrahman Ghufron**,  
Dosen Sosiologi dan Ketua Prodi  
Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.